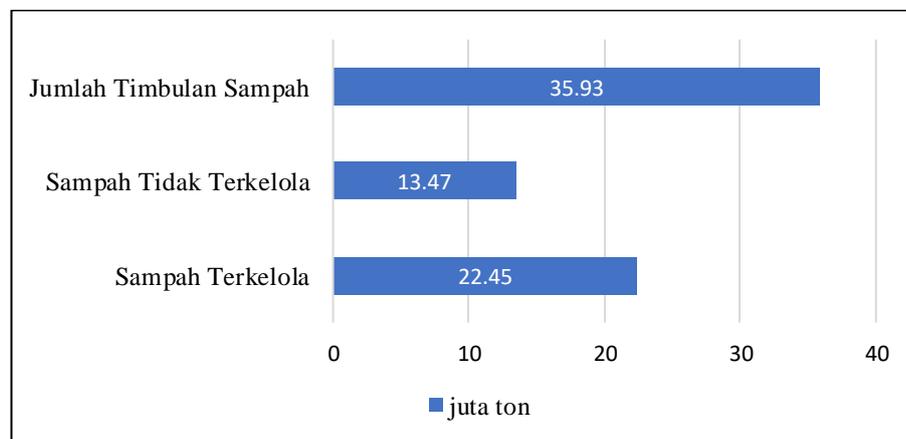


# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Sampah selalu menjadi masalah yang melanda setiap negara, terutama negara berkembang termasuk Indonesia yang masih kesulitan dalam menangani masalah sampah. Data dari Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) tahun 2022, mencatat bahwa jumlah timbulan sampah di Indonesia hasil input dari 303 Kabupaten/kota mencapai 35,93 juta ton/tahun. 22,45 juta ton atau 62,49% merupakan sampah yang terkelola, dan 37,51% atau 13,47 juta ton nya merupakan sampah tidak terkelola. Satu orang penduduk Indonesia dapat menyumbang sampah sebanyak 0,7 kg/hari.



Sumber: [sipsn.menlhk.go.id](https://sipsn.menlhk.go.id)

**Gambar 1.1.**  
Grafik Data Timbulan Sampah Indonesia Tahun 2022

Masalah sampah adalah masalah multifaset yang serius, karena itu perlu adanya resonansi terus menerus dari masalah sampah. Pertumbuhan penduduk yang terus berlanjut akan menyebabkan peningkatan aktivitas manusia dan akan

berdampak pada peningkatan konsumsi serta aktivitas masyarakat (Aida et al., 2021). Hal tersebut dapat menyebabkan tingginya timbulan sampah yang dihasilkan. Seperti halnya di negara Ethiopia, pertumbuhan populasi yang cepat dan urbanisasi yang tinggi menjadi salah satu faktor penyebab peningkatan volume sampah yang dihasilkan (Mulat et al., 2019). Hampir setiap daerah di Indonesia memiliki simpanan berupa sampah, dan jumlah sampah yang beredar tidak sedikit, bahkan mencapai jutaan ton. Sampah yang kita buang tidak pernah terbuang, hanya dialihkan ke Tempat Pembuangan Akhir atau biasa kita sebut TPA.

Berdasarkan data yang dirilis oleh Kemitraan Aksi Plastik Nasional Indonesia pada April 2020, Indonesia masih mengakumulasi hingga 67,2 juta ton sampah setiap tahun, dimana 9% atau sekitar 620 ribu ton masuk ke sungai, danau, dan lautan. Indonesia diperkirakan menghasilkan sampah sebanyak 85 ribu ton/hari dan diperkirakan akan tumbuh sebanyak 150 ribu ton/hari pada tahun 2025. Jumlah ini terutama merupakan limbah domestik, yang jumlahnya mencapai 60% hingga 75%. Sifat sampah plastik tidak mudah terurai. Komposisi sampah plastik pada umumnya adalah 46% polietilen (HDPE dan LDPE), 16% polipropilen (PP), 16% polistiren (PS), 7% polivinil klorida (PVC), 5% polyethylene terephthalate (PET), 5% acrylonitrile-butadiene-styrene (ABS) dan polimer lainnya (Wahyudi et al., 2018). Dalam proses pengelolaannya juga menimbulkan toksit dan bersifat karsinogenik serta membutuhkan waktu ratusan tahun untuk terurai secara alami.

Masalah sampah memiliki dampak yang sangat besar terhadap lingkungan. Mulat et al., (2019) dalam penelitiannya tentang pengelolaan limbah padat di Kota Injibara, Ethiopia menyebutkan bahwa pembuangan sampah yang tidak dikelola dengan baik dapat menyebabkan pencemaran tanah, air, dan udara yang mengancam kesehatan masyarakat dan ekosistem alam. Penumpukan limbah sampah dalam volume yang banyak dapat menyebabkan pencemaran tanah. Selain itu, jika sampah dibakar, asap yang dihasilkan akan mengakibatkan pencemaran udara. Terlebih jika sampah dibuang ke sungai atau lautan, selain menyebabkan pencemaran air maka akan merusak ekosistem di dalamnya. “Dalam hal pencemaran laut, Indonesia menjadi penghasil sampah plastik di laut terbesar kedua di dunia,” kata Bagong Sutoyo, Ketua Umum Asosiasi Pelapak dan Pemulung Indonesia (APPI), 2022. Sebuah studi yang dilakukan oleh Universitas California Davis dan Universitas Hasanuddin di pasar Paotere Makassar, menemukan bahwa 23% sampel ikan memiliki kandungan plastik di perutnya.

Kerusakan lingkungan yang terjadi di Indonesia saat ini adalah dampak dari perbuatan masyarakat yang sering membuang sampah sembarangan dan tidak mengelola sampah dengan baik. Allah Swt. berfirman dalam Al-Qur’an surah Ar-Rum (30) Ayat 41, yang berbunyi:

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ  
بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

Artinya: “Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar)” Q.S Ar-Rum (30) Ayat 41.

Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwasannya kerusakan alam yang terjadi di bumi adalah akibat dari perbuatan manusia. Allah Swt. memberikan peringatan berupa kerusakan alam seperti terjadinya pencemaran udara, air, laut, sungai dan tanah agar manusia merasakan akibat dari perbuatannya tersebut. Dan atas cinta, kasih dan kelembutan-Nya, Allah Swt. berharap manusia kembali ke jalan yang benar dan lebih mencintai alam.

Timbunan sampah dalam volume yang banyak berpotensi menghasilkan gas metana ( $\text{CH}_4$ ) dan memicu munculnya emisi Gas Rumah Kaca (GRK) sehingga menyebabkan terjadinya pemanasan global (Rarastry, 2016). Gas metana ( $\text{CH}_4$ ) yang tidak dikelola dengan baik akan terlepas ke atmosfer dan berkontribusi pada pemanasan global (*global warming*). Vassanadumrongdee & Kittipongvises, (2018) juga menyebutkan dalam penelitiannya tentang pengelolaan sampah di Bangkok, Thailand bahwasannya timbunan sampah dalam jumlah yang banyak menghasilkan emisi gas rumah kaca yang berkontribusi terhadap perubahan iklim global. Semakin banyak timbunan sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA), maka semakin banyak pula gas metana ( $\text{CH}_4$ ) yang dihasilkan. Hal tersebut menjadi tantangan bagi Indonesia dalam target penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) dan mewujudkan *net zero emission* tahun 2050.

Tasikmalaya menjadi salah satu wilayah penyumbang sampah terbanyak di Jawa Barat. Berdasarkan Data Konsolidasi Bersih (DKB) Semester I Tahun 2023 dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, jumlah penduduk Kota Tasikmalaya yang terdiri dari 10 Kecamatan mencapai 752.546 jiwa. Artinya,

semakin tinggi pertumbuhan penduduk maka semakin tinggi pula kebutuhan yang harus dipenuhi. Meningkatnya kebutuhan manusia akan menimbulkan sampah dalam jumlah besar dari segala aktivitas manusia tersebut (Nurawaliyah, 2018).

Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Ciangir merupakan satu-satunya tempat pembuangan sampah terbesar di Kota Tasikmalaya yang terletak di Kelurahan Tamansari, Kecamatan Tamansari, Kota Tasikmalaya. TPA Ciangir telah beroperasi sejak tahun 2002 dan memiliki luas kurang lebih 12 Ha dengan area penimbunan sekitar 5 Ha. Sampah yang berasal dari 10 Kecamatan yang ada di Kota Tasikmalaya seluruhnya dibuang ke TPA Ciangir. Jumlah timbunan sampah yang dihasilkan dari 10 Kecamatan tersebut mencapai 320 ton/hari, sedangkan yang terangkut ke TPA Ciangir hanya 220 ton/hari (DLH Kota Tasikmalaya, 2023). Sampah domestik (rumah tangga) mendominasi sumber sampah yaitu sekitar 60,23%, selain itu juga terdapat sampah non-domestik yang berasal dari pasar, pertokoan, perkantoran, fasilitas umum, dan lain-lain (Menlhk, 2019b). Berikut data volume sampah yang dihasilkan dalam kurun waktu 6 tahun terakhir di Kota Tasikmalaya:

**Tabel 1.1.**  
Data Volume Sampah Kota Tasikmalaya Tahun 2018-2023

<b>Tahun</b>	<b>Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah Sampah Harian (ton)</b>	<b>Jumlah Sampah Tahunan (ton)</b>
2018	Kota Tasikmalaya	179,15	64.485,44
2019	Kota Tasikmalaya	291,95	106.560,83
2020	Kota Tasikmalaya	292,30	106.688,51
2021	Kota Tasikmalaya	315,11	114.650,15
2022	Kota Tasikmalaya	319,11	116.475,95
2023	Kota Tasikmalaya	320	-

Sumber: sipsn.menlhk.go.id

Tabel 1.1. merupakan data volume sampah Kota Tasikmalaya dari tahun 2018 sampai tahun 2023. Tercatat bahwa jumlah sampah yang dihasilkan di Kota Tasikmalaya terus meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2023, jumlah sampah harian yang dihasilkan mencapai 320 ton/hari. Jumlah tersebut meningkat sebesar 0,89 ton dari tahun 2022.

Dalam penelitian (Haerani et al., 2019) tentang pengelolaan sampah di Kota Tasikmalaya, menyebutkan bahwa pengelolaan sampah di TPA Ciangir masih dilakukan dengan sistem Kumpul-Angkut-Buang, dimana sampah dikumpulkan di satu tempat oleh masyarakat kemudian diangkut oleh petugas kebersihan dan selanjutnya dibuang ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Pengelolaan sampah di TPA Ciangir juga masih menggunakan sistem *open dumping*, dimana sampah hanya ditumpuk, lalu diratakan dan tidak ditimbun tanah penutup. Namun TPA Ciangir saat ini mulai berganti dari yang semula menggunakan sistem *open dumping* sekarang menjadi *Sanitary landfill*, yaitu timbunan sampah yang ditutupi dengan tanah tetapi hanya dilakukan dalam periode tertentu. Nurawaliyah (2018) dalam penelitiannya juga membahas tentang pengelolaan sampah di TPA Ciangir dan menyebutkan bahwa pengelolaan sampah di TPA Ciangir dilakukan secara manual oleh pemulung terutama pada saat memisahkan sampah antara organik dan anorganik. Hal ini disebabkan belum adanya peralatan atau mesin pemilah sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Ciangir.

Keberadaan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Ciangir memberikan dampak positif dan dampak negatif bagi masyarakat sekitar, terutama masyarakat yang

bertempat tinggal di Kecamatan Tamansari. Berdasarkan studi yang dilakukan oleh Rusliana et al., (2022), dampak positif yang didapatkan oleh masyarakat di sekitar TPA Ciangir adalah adanya pendapatan yang dihasilkan dari pemanfaatan sampah TPA Ciangir. Sedangkan dampak negatif dari adanya TPA Ciangir adalah timbulnya pencemaran air dan udara. Penelitian oleh Hartini & Yulianto (2018), menyebutkan pencemaran air terjadi karena limbah cair (lindi) dari TPA Ciangir mengalir ke sungai Cipakaran yang sebagian masyarakat manfaatkan untuk aliran irigasi. Lindi (*leachate*) yang mengalir ke sungai tersebut tersebar ke area persawahan dan masuk ke kolam-kolam yang ada di sekitar TPA. Untuk pencemaran udara, TPA Ciangir menghasilkan bau yang mengganggu kesehatan pernapasan masyarakat sekitar. Pencemaran tersebut pada akhirnya akan menimbulkan tambahan pengeluaran biaya kesehatan yang harus ditanggung sendiri oleh masyarakat.

Dalam UU Nomor 18 tahun 2008 diatur tentang bagaimana melaksanakan pengelolaan sampah yang efisien dan ekonomis, yaitu pengelolaan sampah terpadu berbasis 3R (*reuse, recycle, reduce*). Dalam undang-undang ini juga dijelaskan bahwasannya kerjasama antara masyarakat dan pemerintah diperlukan untuk mencapai keberhasilan dalam pengelolaan sampah. Bukan hanya pemerintah yang harus bertanggung jawab dalam melakukan pengelolaan sampah, tetapi masyarakat juga harus ikut andil di dalamnya agar kualitas lingkungan hidup tetap terjaga.

Sampai saat ini, TPA Ciangir belum menerapkan sistem pengelolaan sampah berbasis 3R (*reuse, recycle, reduce*). Adanya keterbatasan teknologi berupa alat

atau mesin pemisah sampah menyebabkan sulitnya pemilahan sampah antara organik dan non-organik. Komposisi sampah yang masuk ke TPA Ciangir di dominasi oleh sampah organik dari sisa makanan (Haerani et al., 2019). Sehingga pemilahan sampah yang dilakukan oleh pemulung hanya berupa plastik, besi, botol, dan barang lainnya yang dapat didaur ulang dan dijual ke pengepul. Sedangkan sampah organik belum ada penanganan lebih lanjut dan berdampak menghasilkan bau dan air lindi (*leachate*).

Dalam upaya mencapai tujuan *Sustainable Development Goals* (SDGs) Indonesia dan menciptakan pengelolaan sampah yang berkelanjutan, maka diperlukan adanya perbaikan dalam pengelolaan sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Ciangir, Kecamatan Tamansari, Kota Tasikmalaya untuk meminimalisir dampak negatif yang dirasakan oleh masyarakat sekitar. Untuk dilakukan perbaikan pengelolaan tersebut tentunya membutuhkan biaya yang besar. Rahim et al., (2017) menyebutkan dalam penelitiannya bahwa retribusi atau *user charger* (tarif pelanggan) merupakan salah satu sumber pembiayaan dalam pengelolaan sampah. Besar kecilnya retribusi dipengaruhi oleh *Willingness to Pay* (WTP) atau disebut juga dengan kesediaan membayar masyarakat.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui besaran *Willingness to Pay* (kesediaan membayar) masyarakat Kecamatan Tamansari, Kota Tasikmalaya untuk perbaikan pengelolaan sampah di TPA Ciangir. *Willingness to Pay* (WTP) adalah metode valuasi ekonomi non-pasar atau metode penentuan harga atas suatu manfaat yang telah diberikan oleh alam atau jasa lingkungan (Lestiani et al., 2022). Salah

satu cara untuk mengetahui nilai kesediaan masyarakat untuk membayar adalah dengan *Contingent Valuation Method* (CVM). CVM dilakukan dengan menggunakan teknik survei kepada responden. CVM merupakan salah satu metode yang dapat digunakan untuk mengestimasi nilai dari barang dan jasa lingkungan berupa *non-market value* (Ruban et al., 2014). Adapun tujuan dari *Contingent Valuation Method* (CVM) adalah untuk mengetahui kesediaan membayar (*Willingness to Pay*) dari masyarakat dan mengetahui kesediaan menerima (*Willingness to Accept*) kerusakan suatu lingkungan (Fauzi, 2004). Metode ini juga dapat memperkirakan nilai non-pengguna, yang memungkinkan seseorang dapat mengukur kegunaan penggunaan barang-barang lingkungan meskipun barang tersebut tidak digunakan secara langsung serta hasil penelitian dengan menggunakan metode ini mudah untuk dianalisis atau diuraikan (Setiawan & Saptutyningsih, 2022).

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Nainggolan (2019) mengenai analisis kesediaan membayar (WTP) masyarakat untuk retribusi pengelolaan sampah di Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung dengan metode *Contingent Valuation Method* (CVM). Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa faktor usia, tingkat pendidikan, pendapatan dan jumlah anggota keluarga berpengaruh secara bersama-sama (simultan) terhadap kesediaan membayar (WTP). Pengaruh dari faktor-faktor tersebut terhadap WTP adalah sebesar 39,9%. Variabel jumlah anggota keluarga tidak berpengaruh secara signifikan terhadap WTP. Masyarakat bersedia membayar retribusi sampah rata-rata sebesar Rp10.208,33 dan nilai rata-rata WTP sebesar Rp20.572,92.

Ruban et al., (2014) juga melakukan penelitian tentang *Willingness to Pay* untuk pengelolaan sampah ramah lingkungan di TPA Dusun Toisapu, Kota Ambon. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa faktor yang berpengaruh terhadap kesediaan masyarakat membayar retribusi pengelolaan sampah di Kabupaten Baguala dan Nusaniwe adalah pendidikan dan jarak rumah dengan TPA. Rata-rata WTP tertinggi pada skenario biogas Kabupaten Baguala sebesar Rp24.250,00/KK per bulan, dan terendah pada skenario insinerasi sebesar Rp20.804,00/KK per bulan. Sedangkan di Kabupaten Nusaniwe, diperoleh rata-rata WTP tertinggi sebesar Rp21.228,00/KK per bulan pada skenario pengomposan, dan terendah sebesar Rp18.220,00/KK per bulan pada skenario *sanitary landfill*.

Kemudian Afroz et al., (2014) menggunakan metode CVM dalam penelitiannya tentang kesediaan membayar untuk perbaikan pengelolaan sampah di kota Dhaka, Bangladesh. Hasil penelitiannya menyebutkan bahwa sebagian besar penduduk di Dhaka, Bangladesh bersedia mengeluarkan biaya tambahan untuk meningkatkan layanan pengelolaan sampah. Faktor-faktor seperti usia, pendidikan, pendapatan, kekhawatiran tentang pengelolaan sampah, kepuasan terhadap layanan pengumpulan sampah, dan kesediaan untuk memisahkan sampah berpengaruh signifikan terhadap kesediaan membayar. Besaran WTP (*Willingness to Pay*) rata-rata adalah 15.82 TK atau Rp2.286,31/rumah tangga per bulan untuk area RDDW (Wilayah Dhaka Berkembang Pesat) dan 12.07 TK atau Rp1.744,36 per rumah tangga per bulan untuk area NRDDW (Wilayah Dhaka Berkembang Tidak Pesat).

Penelitian lain dilakukan oleh Vassanadumrongdee & Kittipongvises (2018) di Bangkok, Thailand tentang faktor-faktor yang mempengaruhi niat pemisahan sumber dan *Willingness to Pay* untuk meningkatkan pengelolaan sampah dengan metode survei menggunakan kuesioner. Dalam penelitiannya disebutkan bahwa besaran WTP (*Willingness to Pay*) untuk meningkatkan layanan pengelolaan sampah dan fasilitas daur ulang di Bangkok adalah sekitar 52,6 THB (1,5 USD) atau sebesar Rp23.006,83 hingga 71,6 THB (2,1 USD) atau sebesar Rp31.316,85 per bulan, dengan nilai median sebesar 40 THB (1,2 USD). Variabel yang berpengaruh terhadap WTP (*Willingness to Pay*) diantaranya adalah kepuasan terhadap layanan pengelolaan sampah, pengetahuan tentang situasi sampah saat ini, sikap terhadap daur ulang, persepsi kondisi fasilitas, tingkat pendapatan, tingkat pendidikan, perilaku pemisahan sumber sampah, dan kesadaran akan manfaat daur ulang.

Kemudian Mulat et al., (2019) melakukan penelitian yang sama tentang *Willingness to Pay* untuk pengelolaan limbah padat di kota Injibara, Ethiopia bagian Barat Laut. Hasilnya menunjukkan bahwa sebagian besar kepala rumah tangga di kota Injibara, Ethiopia bagian Barat Laut, bersedia membayar untuk layanan pengelolaan sampah yang lebih baik. Sebanyak 81,06% masyarakat menyatakan kesediaan untuk membayar, dengan jumlah rata-rata sebesar 29,7 ETB (\$1,07) atau sekitar Rp8.469,93/bulan. Faktor-faktor seperti jenis kelamin, status kekayaan, tingkat pendidikan, usia, jumlah sampah yang dihasilkan, jarak dari tempat pembuangan sampah, dan kepuasan terhadap layanan yang ada terbukti signifikan dalam mempengaruhi kesediaan untuk membayar.

Dalam meningkatkan perbaikan pengelolaan sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Ciangir, Kecamatan Tamansari, Kota Tasikmalaya sebagai upaya menuju *zero waste*, *zero emission*, maka diperlukan adanya kerjasama antara pemerintah, masyarakat dan Dinas Lingkungan Hidup Kota Tasikmalaya. Upaya perbaikan pengelolaan sampah di TPA Ciangir ini perlu dilakukan untuk mengurangi timbunan sampah yang ada dan dampaknya terhadap lingkungan. Oleh karena itu, penulis mengambil penelitian dengan judul: **“Analisis *Willingness to Pay* (WTP) Untuk Perbaikan Pengelolaan Sampah Di TPA Ciangir, Kecamatan Tamansari, Kota Tasikmalaya”**.

#### **B. Batasan Masalah**

Dalam penelitian ini, permasalahan yang diteliti hanya dilakukan di Kecamatan Tamansari, Kota Tasikmalaya, atau sekitar lokasi Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Ciangir.

#### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan penjelasan latar belakang diatas, diperlukan analisis kesediaan membayar (WTP) masyarakat untuk perbaikan pengelolaan sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Ciangir, Kecamatan Tamansari, Kota Tasikmalaya. Adapun pertanyaan penelitian yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Berapa besar nilai kesediaan membayar atau *Willingness to Pay* (WTP) masyarakat untuk perbaikan pengelolaan sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Ciangir, Kecamatan Tamansari, Kota Tasikmalaya?

2. Bagaimana pengaruh variabel usia terhadap *Willingness to Pay* (WTP) masyarakat untuk perbaikan pengelolaan sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Ciangir, Kecamatan Tamansari, Kota Tasikmalaya?
3. Bagaimana pengaruh variabel pendidikan terhadap *Willingness to Pay* (WTP) masyarakat untuk perbaikan pengelolaan sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Ciangir, Kecamatan Tamansari, Kota Tasikmalaya?
4. Bagaimana pengaruh variabel pendapatan terhadap *Willingness to Pay* (WTP) masyarakat untuk perbaikan pengelolaan sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Ciangir, Kecamatan Tamansari, Kota Tasikmalaya?
5. Bagaimana pengaruh variabel pekerjaan terhadap *Willingness to Pay* (WTP) masyarakat untuk perbaikan pengelolaan sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Ciangir, Kecamatan Tamansari, Kota Tasikmalaya?
6. Bagaimana pengaruh variabel jumlah anggota keluarga terhadap *Willingness to Pay* (WTP) masyarakat untuk perbaikan pengelolaan sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Ciangir, Kecamatan Tamansari, Kota Tasikmalaya?
7. Bagaimana pengaruh variabel jarak tempat tinggal ke TPA terhadap *Willingness to Pay* (WTP) masyarakat untuk perbaikan pengelolaan sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Ciangir, Kecamatan Tamansari, Kota Tasikmalaya?
8. Bagaimana pengaruh variabel kepuasan layanan pengelolaan sampah terhadap *Willingness to Pay* (WTP) masyarakat untuk perbaikan pengelolaan

sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Ciangir, Kecamatan Tamansari, Kota Tasikmalaya?

#### **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dipaparkan diatas, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengukur besaran *Willingness to Pay* (WTP) masyarakat untuk perbaikan pengelolaan sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Ciangir, Kecamatan Tamansari, Kota Tasikmalaya.
2. Menganalisis pengaruh variabel usia terhadap *Willingness to Pay* (WTP) masyarakat untuk perbaikan pengelolaan sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Ciangir, Kecamatan Tamansari, Kota Tasikmalaya.
3. Menganalisis pengaruh variabel pendidikan terhadap *Willingness to Pay* (WTP) masyarakat untuk perbaikan pengelolaan sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Ciangir, Kecamatan Tamansari, Kota Tasikmalaya.
4. Menganalisis pengaruh variabel pendapatan terhadap *Willingness to Pay* (WTP) masyarakat untuk perbaikan pengelolaan sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Ciangir, Kecamatan Tamansari, Kota Tasikmalaya.
5. Menganalisis pengaruh variabel pekerjaan terhadap *Willingness to Pay* (WTP) masyarakat untuk perbaikan pengelolaan sampah di Tempat

Pembuangan Akhir (TPA) Ciangir, Kecamatan Tamansari, Kota Tasikmalaya.

6. Menganalisis pengaruh variabel jumlah anggota keluarga terhadap *Willingness to Pay* (WTP) masyarakat untuk perbaikan pengelolaan sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Ciangir, Kecamatan Tamansari, Kota Tasikmalaya.
7. Menganalisis pengaruh variabel jarak tempat tinggal ke TPA terhadap *Willingness to Pay* (WTP) masyarakat untuk perbaikan pengelolaan sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Ciangir, Kecamatan Tamansari, Kota Tasikmalaya.
8. Menganalisis pengaruh variabel kepuasan layanan pengelolaan sampah terhadap *Willingness to Pay* (WTP) masyarakat untuk perbaikan pengelolaan sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Ciangir, Kecamatan Tamansari, Kota Tasikmalaya.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, antara lain:

##### 1. Manfaat Teoritis

###### a. Bagi penulis

Dapat menambah wawasan dan pengetahuan, serta dapat mengimplemetasikan ilmu yang diperoleh selama dibangku perkuliahan ke lapangan secara langsung dengan melakukan penelitian dalam rangka menyelesaikan studi.

b. Bagi peneliti selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi untuk penelitian selanjutnya, baik di dalam kampus maupun diluar kampus. Dan juga diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan tentang kesediaan membayar atau *Willingness to Pay* untuk pengelolaan sampah.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi pemerintah daerah selaku pemangku kepentingan dan penentu kebijakan dalam penentuan kebijakan-kebijakan dan rancangan program kerja terkait pengelolaan sampah di Kota Tasikmalaya. Dan juga harapannya dapat berguna sebagai informasi dan pertimbangan untuk perbaikan serta peningkatan sistem pengelolaan sampah di TPA Ciangir.

b. Bagi masyarakat

Dapat mengetahui informasi sekaligus menjadi masukan untuk meningkatkan pemahaman, kesadaran, dan kepedulian terhadap pengelolaan sampah di lingkungan sekitar.